

Analisis Persepsi Mahasiswa Mengenai Kepercayaan kepada Pemerintah dan Transparansi Pengelolaan Pajak dalam Mendorong Kepatuhan Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus Mahasiswa Akuntansi Universitas Teknologi Digital)

Vani Aulia¹, Ita Suryanita Supyan²

^{1,2}Universitas Teknologi Digital, Bandung, Indonesia

E-mail: vani10222034@digitechuniversity.ac.id¹, Itasuryanita@digitechuniversity.ac.id²

Article History:

Received: 02 Juli 2026

Revised: 26 Agustus 2026

Accepted: 02 September 2026

Keywords:

Persepsi Mahasiswa, Kepercayaan kepada Pemerintah, Kepatuhan Kewajiban Perpajakan, Transparansi Pengelolaan Pajak.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis persepsi mahasiswa mengenai kepercayaan kepada pemerintah dan transparansi pengelolaan pajak dalam mendorong kepatuhan kewajiban perpajakan, menganalisis peran kedua faktor tersebut sebagai bentuk motivasi dan niat mahasiswa untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan di masa depan, serta mengidentifikasi faktor penghambat dan upaya mengatasi persepsi buruk terhadap pemerintah dan transparansi pengelolaan pajak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan mahasiswa kepada pemerintah dipengaruhi oleh keadilan, transparansi, integritas, serta kinerja pemerintah dalam pengelolaan pajak. Transparansi pengelolaan pajak juga dinilai berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan dan niat mahasiswa untuk memenuhi kewajiban perpajakan pada masa mendatang. Faktor penghambat yang dipersepsikan mahasiswa meliputi kurangnya transparansi, kasus korupsi, kebijakan perpajakan yang belum konsisten, serta kompleksitas sistem perpajakan sehingga menimbulkan persepsi negatif terhadap pemerintah. Upaya yang diperlukan untuk mengatasi kondisi tersebut meliputi peningkatan transparansi, penegakan hukum yang tegas, penyederhanaan sistem perpajakan, dan edukasi perpajakan guna meningkatkan kepercayaan serta kepatuhan kewajiban perpajakan di masa depan.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam

membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan yang tidak semata-mata administratif, melainkan juga psikologis dan sosial. Meskipun pemerintah telah mengimplementasikan modernisasi sistem perpajakan melalui digitalisasi, pelaporan daring, dan inisiatif edukasi fiskal, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kepatuhan pajak belum optimal, walaupun rasio kepatuhan formal secara nasional terus menunjukkan perbaikan yang stabil. Keberhasilan penerimaan pajak tidak hanya ditentukan oleh kebijakan perpajakan, tetapi juga oleh tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Salah satu faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan tersebut adalah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Tingkat kepercayaan yang tinggi dapat mendorong kesediaan masyarakat untuk membayar pajak, sedangkan rendahnya kepercayaan dapat menimbulkan keraguan terhadap pengelolaan dana pajak. Selain itu, transparansi pengelolaan pajak menjadi aspek penting karena keterbukaan informasi mengenai penerimaan dan penggunaan pajak dapat meningkatkan akuntabilitas serta kepercayaan publik terhadap pemerintah. Jika publik merasa bahwa dana pajak tidak dikelola dengan integritas atau tidak diperuntukkan bagi kepentingan kolektif, maka timbul resistensi etis yang menurunkan motivasi untuk patuh.

Mahasiswa merupakan kelompok generasi muda yang pada masa mendatang akan memasuki dunia kerja, usaha dan aktivitas ekonomi produktif, sehingga mereka secara potensial akan berperan sebagai wajib pajak. Mereka merupakan calon wajib pajak di masa depan, sekaligus berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial terhadap performa pemerintah. Pada era digital kontemporer, mahasiswa terbiasa mendapatkan beragam informasi secara digital terkait kebijakan fiskal, alokasi dana publik, serta isu korupsi yang dapat mempengaruhi persepsi mereka terhadap keadilan dan kepercayaan dalam sistem perpajakan. Persepsi yang terbentuk dari eksposur tersebut bersifat multidimensi dan sering kali terpengaruh oleh pengalaman personal, narasi kolektif, serta data yang bersirkulasi di domain publik. Mahasiswa sebagai calon wajib pajak tidak hanya dipandang sebagai subjek yang akan memiliki kewajiban fiskal, tetapi juga sebagai generasi penerus yang akan menentukan tingkat kepatuhan pajak di masa depan. Pemahaman, sikap dan persepsi mahasiswa terhadap pajak, pemerintah serta transparansi pengelolaan keuangan negara sejak dini sangat penting karena akan membentuk niat dan perilaku kepatuhan pajak ketika mereka telah memiliki penghasilan. Mahasiswa yang memiliki tingkat literasi yang baik serta kepercayaan terhadap pemerintah cenderung memiliki niat yang lebih kuat untuk patuh membayar pajak di masa depan, sebaliknya persepsi negatif terhadap pengelolaan pajak dan rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah dapat menjadi faktor penghambat kepatuhan pajak di kemudian hari. Oleh karena itu mahasiswa dapat dipandang sebagai calon wajib pajak yang strategis dalam pembangunan sistem perpajakan nasional

Fenomena menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah tidak dapat dilepaskan dari maraknya kasus korupsi dan penyalahgunaan anggaran yang terus diberitakan di media. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik memiliki hubungan erat dengan kepatuhan pajak, ketika masyarakat meyakini bahwa pajak mereka dikelola dengan jujur dan transparan, mereka cenderung lebih bersedia membayar pajak secara sukarela. Fenomena terbaru diawal tahun 2026 ini adalah setelah terungkapnya kasus dugaan suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara pada Januari 2026. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap adanya dugaan aliran dana dari tersangka kepada sejumlah pihak di Direktorat Jenderal Pajak, yang mendorong penggeledahan di kantor pusat DJP serta penyitaan dokumen, barang bukti elektronik, dan sejumlah uang. Peristiwa ini mencerminkan masih adanya permasalahan integritas serta kurangnya transparansi dalam administrasi perpajakan, yang berpotensi menurunkan kepercayaan

masyarakat terhadap pemerintah dan berdampak pada kepatuhan membayar pajak. Kondisi tersebut dapat berdampak pada persepsi masyarakat terhadap sistem perpajakan dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana persepsi mahasiswa sebagai generasi muda dan calon wajib pajak terhadap kepercayaan kepada pemerintah dan transparansi pengelolaan pajak dalam mendorong kepatuhan kewajiban perpajakan.

Beberapa penelitian terdahulu telah banyak membahas mengenai bagaimana mahasiswa sebagai calon wajib pajak di masa depan akan memiliki niat atau perilaku untuk taat pajak, faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi kepatuhan tersebut serta mengkaji berbagai variabel lainnya yang berkaitan dengan persepsi mahasiswa sebagai calon wajib pajak di masa depan. Sebagian besar penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan penekanan pada pengukuran tingkat kepercayaan atau kepatuhan melalui skor dan persentase, tanpa mengeksplorasi pengalaman dan signifikansi subjektif di balik data tersebut. Akan tetapi, kajian melalui pendekatan kualitatif untuk menyelidiki bagaimana mahasiswa menginterpretasikan kepercayaan terhadap pemerintah dan transparansi dalam manajemen pajak masih sangat minim. Dalam bidang penelitian perpajakan, metodologi kualitatif memberikan kedalaman eksplorasi yang tidak dapat dicapai oleh pendekatan kuantitatif. Dengan menggunakan wawancara intensif dan analisis naratif, peneliti mampu memahami bagaimana mahasiswa menginterpretasikan pengalaman mereka terkait informasi publik, liputan media mengenai korupsi, serta kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berfokus pada bagaimana persepsi mahasiswa terhadap kepercayaan kepada pemerintah dan transparansi pengelolaan pajak dalam mendorong kepatuhan kewajiban perpajakan. Kepercayaan kepada pemerintah dan transparansi pengelolaan pajak merupakan dua aspek penting yang dapat memengaruhi pandangan serta sikap individu terhadap kewajiban perpajakan. Persepsi yang positif terhadap kedua aspek tersebut berpotensi meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan, sedangkan persepsi yang negatif dapat menimbulkan keraguan dan mengurangi tingkat kepatuhan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi mahasiswa Akuntansi Universitas Teknologi Digital mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepercayaan kepada pemerintah serta peran transparansi pengelolaan pajak dalam membentuk kepatuhan kewajiban perpajakan di masa depan. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi berbagai faktor yang dapat menghambat maupun mendukung terbentuknya kepercayaan dan transparansi dalam pengelolaan pajak. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pandangan generasi muda sebagai calon wajib pajak serta menjadi masukan bagi pemerintah dalam meningkatkan kepercayaan publik dan kepatuhan perpajakan di masa yang akan datang.

LANDASAN TEORI

Theory Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikemukakan oleh (Ajzen, 2020) menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu niat (*intention*) yang terbentuk dari sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Selain itu, persepsi kontrol perilaku dapat secara langsung memengaruhi perilaku ketika kontrol yang dirasakan mencerminkan kontrol aktual atas pelaksanaan perilaku. Niat perilaku dapat dilihat melalui kekuatan niat, kesiapan bertindak, serta komitmen individu untuk melaksanakan perilaku dalam periode tertentu. Niat ini kemudian menjadi prediktor paling kuat dari perilaku aktual apabila didukung oleh persepsi kontrol yang memadai (Paul et al., 2023).

Dalam konteks perpajakan, teori ini menjelaskan bahwa seseorang akan memiliki kecenderungan untuk memenuhi kewajiban perpajakan apabila memiliki sikap positif terhadap pajak, memperoleh dukungan sosial, dan meyakini bahwa dirinya mampu melaksanakan kewajiban tersebut. Pada penelitian ini, TPB digunakan untuk memahami bagaimana kepercayaan kepada pemerintah dan transparansi pengelolaan pajak dapat membentuk niat mahasiswa untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan.

Persepsi

Persepsi dapat diartikan sebagai suatu proses seseorang menyadari beberapa hal melalui penginderaan atau respon atau tanggapan langsung dari sesuatu (Manjaleni, 2022). Persepsi adalah *perception*, yaitu cara pandang terhadap sesuatu atau mengutarakan pemahaman hasil olahan daya pikir, artinya persepsi berkaitan dengan faktor-faktor eksternal yang direspons melalui pancaindra, daya ingat, dan daya jiwa (Nisa et al., 2025). Persepsi merupakan salah satu proses yang didahului melalui Rangsangan yang diterima, diseleksi, diorganisir dan diinterpretasikan informasinya. Persepsi tidak hanya tergantung pada rangsangan fisik tetapi juga rangsangan yang berhubungan dengan lingkungan disekitarnya bersangkutan (Tuatfaru, 2020). dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan proses internal dalam diri seseorang untuk memahami dan memberi makna terhadap suatu objek atau peristiwa yang diterima melalui panca indera. Proses persepsi tidak berhenti pada penerimaan rangsangan saja, tetapi melibatkan tahapan penyeleksian, pengorganisasian, serta penginterpretasian informasi oleh daya pikir.

Transparansi Pengelolaan Pajak

Transparansi pengelolaan pajak merupakan keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi mengenai penerimaan, pengalokasian, dan penggunaan dana pajak kepada masyarakat. Konsep ini mencakup pengungkapan informasi yang jelas kepada publik mengenai kebijakan pajak, alokasi anggaran, dan efektivitas pengelolaan pajak untuk mencegah korupsi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat (OECD, 2021). Transparansi yang baik dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan memperkuat kepercayaan publik. Selain itu, transparansi juga berarti adanya akses luas bagi masyarakat untuk mengetahui dan menilai bagaimana dana publik dikelola (Geli & Anggraini, 2025).

Dalam penelitian (Wardani et al., 2022) transparansi yang dilakukan oleh fiskus (otoritas pajak) memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam studi kasus di Kabupaten Belitung Timur, mereka menemukan bahwa semakin jelas dan terbuka otoritas pajak dalam menyampaikan informasi, semakin tinggi kepercayaan (*trust*) wajib pajak, yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan. Transparansi pengelolaan pajak secara signifikan memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Dalam konteks administrasi pajak, transparansi baik dari sisi informasi pajak yang disampaikan oleh otoritas pajak maupun mekanisme pelaporan keuangan public membangun kepercayaan wajib pajak dan mendorong kepatuhan sukarela. kualitas transparansi anggaran dan pelaporan publik berpengaruh pada persepsi kepercayaan serta perilaku kepatuhan wajib pajak (Islami et al., 2024). Modernisasi administrasi pajak meningkatkan keterbukaan proses pengawasan dan layanan, sehingga memperkuat persepsi transparansi (Bahrien & Purba, 2024).

Kepercayaan Kepada Pemerintah

Kepercayaan terhadap pemerintah merupakan elemen esensial dalam interaksi antara negara dan masyarakat. Kepercayaan ini merefleksikan keyakinan publik bahwa pemerintah bertindak dengan integritas, keadilan, transparansi, dan fokus pada kepentingan bersama.

Kepercayaan kepada pemerintah merupakan kepercayaan masyarakat pada pemerintah atas moral, perilaku, dan sikap dari pemerintah yang tercermin dari kebijakan yang dibuat (Zainudin et al., 2022). Secara garis besar kepercayaan adalah bukan hanya sekedar yakin melainkan kesediaan untuk mengambil resiko karena adanya bukti nyata akan konsistensi, kejujuran dan kemampuan pihak lain. Kepercayaan kepada pemerintah merupakan suatu keyakinan warga negara kepada pemerintah akan bertindak jujur, kompeten untuk kepentingan publik. Kepercayaan kepada pemerintah merupakan komponen utama dari kepercayaan publik. Kepercayaan publik terbentuk melalui nilai-nilai moral, integritas pemimpin, serta konsistensi pemerintah dalam menyediakan layanan kepada masyarakat, sehingga kepercayaan tidak muncul secara spontan, melainkan dikembangkan melalui pengalaman interaksi masyarakat dengan institusi pemerintahan (Darmanto, 2023).

Kepercayaan kepada pemerintah merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi perilaku pajak masyarakat, khususnya terkait kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepercayaan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, mengindikasikan bahwa persepsi wajib pajak mengenai kejujuran dan transparansi pemerintah menjadi faktor yang memperkuat atau melemahkan perilaku pajak (Pauji, 2020). Rendahnya kepercayaan masyarakat akibat adanya persepsi penyalahgunaan dana pajak dapat menimbulkan rasa takut dan kekhawatiran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak (Manjaleni, 2022). Kepercayaan kepada pemerintah sangat dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap konsistensi kebijakan dan tata kelola pemerintah (Rizalti & Iskandar, 2025). Kepercayaan publik terbentuk dari lima indikator utama, yaitu komitmen pemerintah, ketulusan, kejujuran, kompetensi, dan keadilan (Ibrahim et al., 2020).

Kepatuhan Kewajiban Perpajakan

Kepatuhan wajib pajak adalah sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat demikian pula sebaliknya (Dzulfitriah & Saepuloh, 2021). Kepatuhan membayar pajak merupakan salah satu aspek penting dalam sistem perpajakan yang mencerminkan tingkat ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan ini tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak, tetapi juga mencakup kesadaran wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya secara benar, lengkap, dan tepat waktu.

Menurut Rahayu, kepatuhan perpajakan merupakan tingkat ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Nurjanah & Manjaleni, 2025). Kepatuhan tersebut mencerminkan kesadaran dan kemauan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela. Selain itu, kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam mencapai target penerimaan negara (Dzulfitriah & Saepuloh, 2021). Kepatuhan wajib pajak tercermin melalui sikap dan perilaku yang menunjukkan kemauan serta kesadaran dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Manjaleni, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis persepsi mahasiswa mengenai kepercayaan kepada pemerintah dan transparansi

pengelolaan pajak dalam mendorong kepatuhan kewajiban perpajakan. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pandangan dan pengalaman informan terhadap fenomena yang diteliti. Objek penelitian ini adalah persepsi mahasiswa mengenai kepercayaan kepada pemerintah dan transparansi pengelolaan pajak, sedangkan subjek penelitian adalah mahasiswa Akuntansi Universitas Teknologi Digital angkatan 2022 yang telah menempuh mata kuliah konsentrasi perpajakan. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan penelitian.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, serta studi literatur yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi dengan membandingkan hasil wawancara dengan observasi di lapangan dan dokumentasi sehingga temuan penelitian dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan serta melakukan *member check* yaitu proses meminta konfirmasi atau pengecekan kembali kepada informan terkait data, catatan atau interpretasi hasil wawancara yang dibuat oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Mahasiswa Mengenai Kepercayaan kepada Pemerintah Dalam Mendorong Kepatuhan Kewajiban Perpajakan

Kepercayaan kepada pemerintah merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam membentuk kepatuhan perpajakan. Tingkat kepercayaan yang tinggi dapat mendorong keyakinan bahwa pajak yang dibayarkan dikelola secara jujur, adil, dan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Sebaliknya, rendahnya kepercayaan dapat menimbulkan keraguan terhadap pengelolaan pajak sehingga memengaruhi sikap masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Persepsi mahasiswa menunjukkan bahwa keadilan dalam penerapan aturan perpajakan, pemerataan manfaat pembangunan, serta integritas pemerintah menjadi aspek yang memengaruhi tingkat kepercayaan kepada pemerintah.

Berdasarkan temuan wawancara dengan mahasiswa akuntansi Universitas Teknologi Digital Angkatan 2022, sebagian besar mahasiswa berpendapat bahwa sistem pengelolaan pajak saat ini belum sepenuhnya mencerminkan keadilan. Hal ini terlihat dari adanya ketimpangan dalam penerapan pajak yaitu ketika sistem perpajakan gagal mendistribusikan beban secara adil, sehingga masyarakat bawah hingga menengah sering kali menanggung beban yang secara proporsional lebih berat dibandingkan kelompok kaya serta belum meratanya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keadilan masih menjadi isu utama dalam membentuk persepsi mahasiswa terhadap pemerintah. Selain itu, kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang sering muncul di ruang publik turut memengaruhi persepsi mahasiswa terhadap pengelolaan pajak. Kondisi tersebut menimbulkan keraguan mahasiswa sebagai calon wajib pajak di masa depan mengenai akuntabilitas pemerintah dalam mengelola dana yang berasal dari masyarakat. Mahasiswa mempersepsikan bahwa jika pemerintah mampu menunjukkan transparansi, tanggung jawab, keadilan, kejujuran dan kinerja yang baik cenderung memperoleh tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dari masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik tidak hanya dibangun melalui kebijakan yang baik, tetapi juga melalui konsistensi pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam perspektif *Theory of Planned Behavior* (TPB), kepercayaan kepada pemerintah dapat dikaitkan dengan komponen *attitude toward behavior* yaitu tingkat penilaian positif atau

negatif seseorang terhadap suatu tindakan tertentu. Kepercayaan yang tinggi akan membentuk sikap positif terhadap kewajiban perpajakan karena individu meyakini bahwa pajak memberikan manfaat bagi masyarakat dan dikelola secara bertanggung jawab. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Ibrahim et al., 2020) yang menyatakan bahwa kepercayaan publik memiliki hubungan yang erat dengan kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, semakin besar pula kecenderungan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Dalam penelitian ini mahasiswa sebagai calon wajib pajak di masa depan mempersepsikan negatif untuk percaya kepada pemerintah, salah satunya diakibatkan dari adanya kasus korupsi di kantor pelayanan pajak. Selain itu, kinerja pemerintah dalam pengelolaan pajak juga menjadi faktor yang mempengaruhi kepercayaan mahasiswa. Kinerja yang baik, transparan, dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan, sedangkan kinerja yang kurang optimal akan menurunkan kepercayaan. Mahasiswa mempersepsikan bahwa penegakan aturan dan sanksi pajak yang belum sepenuhnya adil juga menjadi faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa terhadap pemerintah.

Persepsi Mahasiswa Mengenai Transparansi Pengelolaan Pajak Dalam Mendorong Kepatuhan Kewajiban Perpajakan

Transparansi merupakan bentuk keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan perpajakan dan penggunaan dana pajak kepada masyarakat. Transparansi yang baik dapat meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap pemerintah sebagai pengelola penerimaan negara. Berdasarkan temuan wawancara dengan mahasiswa akuntansi Universitas Teknologi Digital angkatan 2022, diperoleh keterangan bahwa informasi perpajakan telah tersedia, namun penyampaiannya belum sepenuhnya efektif. Keterbukaan informasi kebijakan dan peraturan pajak yang disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat, khususnya generasi muda, sebenarnya sudah tersedia namun belum disampaikan secara efektif karena masih menggunakan bahasa yang terlalu teknis, kurang menarik, dan sulit dipahami oleh mahasiswa, sehingga informasi tersebut belum sepenuhnya dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran pajak di kalangan generasi muda sebagai calon wajib pajak di masa depan. Mereka juga beranggapan bahwa, keterbukaan informasi pengelolaan pajak sangat mempengaruhi untuk patuh kewajiban perpajakan di masa depan. Jika pemerintah mampu menunjukkan secara transparan bagaimana pajak dikelola dan memberikan manfaat bagi masyarakat, maka akan lebih termotivasi untuk patuh dan memiliki kesadaran pajak yang lebih tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transparansi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan informasi, tetapi juga menyangkut kemudahan akses dan pemahaman terhadap informasi yang diberikan.

Keterbukaan mengenai penggunaan dana pajak sebagai bentuk transparansi pengelolaan pajak oleh pemerintah menjadi aspek yang sangat penting dalam membangun persepsi positif terhadap pengelolaan pajak. Ketika pemerintah mampu menunjukkan secara jelas bagaimana pajak digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik, maka kepercayaan masyarakat akan meningkat. Sebaliknya, kurangnya informasi mengenai pemanfaatan dana pajak dapat menimbulkan keraguan dan persepsi negatif terhadap sistem perpajakan. Dalam kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB), transparansi berperan dalam membentuk *attitude toward behavior*. Informasi yang jelas dan mudah dipahami akan meningkatkan pengetahuan serta pemahaman individu mengenai manfaat pajak sehingga menghasilkan sikap yang lebih positif terhadap kewajiban perpajakan. Sikap tersebut pada akhirnya mendorong munculnya niat untuk berperilaku patuh. Hasil ini mendukung penelitian (Wardani et al., 2022) yang menyatakan bahwa

transparansi pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak melalui peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam penelitian ini mahasiswa sebagai calon wajib pajak di masa depan mempersepsikan bahwa transparansi pengelolaan pajak oleh pemerintah dapat dikategorikan sudah cukup baik dan memberikan dampak positif walaupun informasi yang disampaikan pemerintah terkait pengelolaan pajak belum sepenuhnya dipahami oleh mahasiswa karena masih menggunakan istilah teknis, bahasa formal dan kurang sederhana, sehingga mahasiswa memerlukan usaha yang lebih agar dapat memahami isi dan maksud informasi tersebut.

Persepsi Mahasiswa Mengenai Kepercayaan Kepada Pemerintah dan Transparansi Pengelolaan Pajak Sebagai Bentuk Motivasi dan Niat Patuh Kewajiban Perpajakan di Masa Depan

Kepercayaan kepada pemerintah dan transparansi pengelolaan pajak merupakan dua faktor penting yang saling berkaitan dalam membentuk motivasi dan niat kepatuhan perpajakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa akuntansi Universitas Teknologi Digital Tahun 2022 sebagai informan dan calon wajib pajak dimasa depan mereka beranggapan bahwa kepercayaan kepada pemerintah dan tingkat transparansi pengelolaan pajak memengaruhi niat untuk patuh kewajiban perpajakan di masa depan, kepercayaan dan transparansi merupakan faktor penting yang mendorong niat kepatuhan pajak. Semakin tinggi tingkat kepercayaan dan transparansi, maka semakin besar pula niat untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Sehingga kedua faktor tersebut sangat berperan dalam menciptakan persepsi positif terhadap sistem perpajakan serta meningkatkan keyakinan bahwa pajak yang dibayarkan akan dikelola secara bertanggung jawab dan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Rasa keadilan, kejujuran, dan keterbukaan pemerintah sangat berpengaruh dalam mendorong motivasi mahasiswa untuk patuh kewajiban perpajakan, karena ketika pemerintah bersikap adil, jujur, dan terbuka dalam pengelolaan pajak, mahasiswa akan merasa lebih percaya, memiliki kesadaran, serta termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan sebagai bentuk tanggung jawab kepada negara. Ketika pemerintah mampu menunjukkan keterbukaan dalam pengelolaan pajak, masyarakat cenderung memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi sehingga muncul dorongan untuk memenuhi kewajiban perpajakan di masa depan.

Menurut *Theory of Planned Behavior* (TPB), niat berperilaku dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu *attitude toward behavior*, *subjective norm*, dan *perceived behavioral control*. Kepercayaan dan transparansi berkontribusi dalam membentuk sikap positif terhadap pajak (*attitude toward behavior*) karena individu memandang pajak sebagai bentuk kontribusi yang memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Selain itu, pendidikan perpajakan, lingkungan akademik, serta pengaruh dari dosen dan lingkungan sekitar turut membentuk *subjective norm* yang mendorong individu untuk memandang kepatuhan pajak sebagai perilaku yang penting dan perlu dilakukan. Pendidikan khususnya di bidang akuntansi dan perpajakan sangat berperan dalam membentuk niat untuk patuh pajak, karena melalui pendidikan tersebut mahasiswa menjadi lebih memahami fungsi pajak, kewajiban sebagai warga negara, serta dampak pajak terhadap pembangunan, sehingga menumbuhkan kesadaran dan motivasi untuk patuh. Di sisi lain, pemahaman terhadap aturan dan prosedur perpajakan dapat meningkatkan *perceived behavioral control*, yaitu keyakinan individu bahwa dirinya mampu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik. Informasi yang jelas dan sistem perpajakan yang mudah dipahami akan memberikan rasa percaya diri bagi calon wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, kepercayaan kepada pemerintah dan transparansi pengelolaan pajak tidak hanya memengaruhi sikap individu terhadap pajak, tetapi juga memperkuat pengaruh lingkungan sosial dan keyakinan

diri yang pada akhirnya membentuk motivasi serta niat untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan di masa depan.

Faktor Penghambat yang Dipersepsikan Mahasiswa Mengenai Kepercayaan Kepada Pemerintah dan Transparansi Pengelolaan Pajak Dalam Mendorong Kepatuhan Kewajiban Perpajakan

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan transparansi, integritas, dan konsistensi kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa akuntansi Universitas Teknologi Tahun 2022, mereka beranggapan bahwa beberapa faktor penghambat kepercayaan kepada pemerintah adalah kurangnya keterbukaan informasi mengenai penggunaan dana pajak, maraknya kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang, ketidakkonsistenan kebijakan perpajakan, penegakan hukum yang belum konsisten serta kompleksitas sistem perpajakan menjadi faktor utama yang menghambat terbentuknya kepercayaan terhadap pemerintah. Kurangnya informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai pengelolaan pajak menimbulkan keraguan terhadap akuntabilitas pemerintah. Selain itu, berbagai kasus penyalahgunaan dana publik memperkuat persepsi negatif terhadap integritas pengelola pajak. Perubahan kebijakan yang dianggap kurang konsisten serta sistem perpajakan yang dinilai rumit juga menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam memahami kewajiban perpajakan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian dan kebingungan, terutama bagi masyarakat yang memiliki pengetahuan perpajakan yang terbatas. Akibatnya, pemahaman mengenai fungsi dan manfaat pajak menjadi kurang optimal, sehingga memengaruhi tingkat kepercayaan terhadap sistem perpajakan yang berlaku.

Berbagai faktor tersebut tidak hanya mempengaruhi tingkat kepercayaan mahasiswa kepada pemerintah, tetapi juga membentuk persepsi mereka terhadap kewajiban perpajakan. Kurangnya transparansi, rendahnya integritas, ketidakkonsistenan kebijakan, serta kompleksitas sistem perpajakan dapat menimbulkan keraguan terhadap efektivitas dan keadilan pengelolaan pajak. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan motivasi mahasiswa untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan di masa depan. Oleh karena itu, peningkatan transparansi, konsistensi kebijakan, serta penyederhanaan sistem perpajakan menjadi langkah penting dalam membangun kepercayaan dan menciptakan persepsi yang lebih positif terhadap sistem perpajakan.

Cara Mengatasi Persepsi Buruk Mengenai Kepercayaan Kepada Pemerintah dan Transparansi Pengelolaan Pajak Dalam Mendorong Kepatuhan Kewajiban Perpajakan

Perbaikan persepsi buruk mahasiswa sebagai calon wajib pajak dimasa depan terhadap pengelolaan pajak memerlukan upaya yang berfokus pada peningkatan kepercayaan dan transparansi pengelolaan pajak. Berdasarkan temuan wawancara dengan mahasiswa akuntansi Universitas Teknologi Digital Tahun 2022 diperoleh keterangan bahwa mahasiswa menilai pemerintah perlu menunjukkan pengelolaan pajak yang lebih transparan, jujur, dan konsisten agar masyarakat dapat melihat secara jelas bagaimana dana pajak digunakan untuk kepentingan publik. Pemerintah perlu meningkatkan transparansi, kejujuran, dan keadilan dalam pengelolaan pajak, disertai penegakan hukum yang tegas, perbaikan sistem dan kinerja, serta pemberian edukasi dan contoh yang baik agar kepercayaan mahasiswa terhadap pengelolaan pajak dapat meningkat. Keterbukaan informasi mengenai penerimaan dan penggunaan dana pajak menjadi aspek yang dianggap penting dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat. Selain itu, penyampaian informasi perpajakan perlu dilakukan dengan cara yang lebih mudah dipahami dan sesuai dengan perkembangan teknologi. Pemanfaatan media digital seperti website resmi, media sosial, infografis,

dan video dinilai dapat membantu masyarakat memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai pengelolaan pajak. Penyajian informasi yang sederhana dan mudah diakses juga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manfaat pajak bagi pembangunan.

Mahasiswa juga memandang bahwa penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran perpajakan dan tindak korupsi merupakan langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan publik. Di samping itu, penyederhanaan sistem perpajakan serta peningkatan edukasi dan sosialisasi perpajakan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya transparansi, konsistensi kebijakan, serta peningkatan kualitas pengelolaan pajak, persepsi negatif masyarakat terhadap pemerintah dapat berkurang dan kepercayaan terhadap sistem perpajakan dapat meningkat.

Selain upaya yang dilakukan oleh pemerintah, partisipasi masyarakat juga memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan terhadap sistem perpajakan. Mahasiswa berpendapat bahwa kesadaran masyarakat untuk mencari informasi, memahami peraturan perpajakan, serta mengawasi penggunaan dana publik dapat mendukung terciptanya hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan, kritik, dan saran terhadap kebijakan perpajakan juga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Dengan adanya komunikasi yang terbuka dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak dapat semakin kuat sehingga mampu mendorong terbentuknya kepatuhan kewajiban perpajakan yang berkelanjutan di masa depan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa bahwa kepercayaan kepada pemerintah dan transparansi pengelolaan pajak merupakan faktor penting yang memengaruhi kepatuhan kewajiban perpajakan. Mahasiswa memandang bahwa kepercayaan kepada pemerintah terbentuk melalui keadilan, integritas, transparansi, serta kinerja pemerintah dalam mengelola dana pajak. Transparansi pengelolaan pajak juga dinilai mampu meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap pemerintah dan mendorong niat untuk memenuhi kewajiban perpajakan di masa depan. Di sisi lain, kurangnya transparansi, maraknya kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang, kebijakan yang tidak konsisten, lemahnya penegakan hukum serta kompleksitas sistem perpajakan menjadi faktor yang dapat menghambat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah dan transparansi pengelolaan pajak saling berkaitan dalam membentuk persepsi positif terhadap sistem perpajakan. Semakin transparan pemerintah dalam mengelola dan menyampaikan informasi mengenai penggunaan dana pajak, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat. Kondisi tersebut dapat mendorong munculnya kesadaran dan niat untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela, sehingga mendukung terciptanya kepatuhan perpajakan yang lebih baik di masa depan. Oleh karena itu, peningkatan transparansi, penegakan hukum yang tegas, penyederhanaan sistem perpajakan, serta edukasi perpajakan yang berkelanjutan perlu dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong kepatuhan kewajiban perpajakan di masa mendatang.

DAFTAR REFERENSI

- Ajzen, I. (2020). *The theory of planned behavior : Frequently asked questions*. April, 314–324. <https://doi.org/10.1002/hbe2.195>

-
- Bahrien, M., & Purba, M. A. P. (2024). *Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Transparansi dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 1220–1234.
- Darmanto. (2023). *Kepercayaan publik*.
- Dzulfitriah, F., & Saepuloh, C. (2021). *PROSIDING Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea*. 6681(4), 32–39.
- Geli, S. G., & Anggraini, D. I. (2025). *Pengaruh transparansi terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada pajak*.
- Ibrahim, Z., Ibrahim, M. A., & Syahribulan. (2020). *YUME : Journal of Management Pengaruh Kepercayaan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 3(2), 80–93. <https://doi.org/10.37531/yum.v1i1.12>
- Islami, P. M., Shodiq, A. N., & Fakhriyyah, D. D. (2024). *Transparansi Anggaran dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak*. 13(01), 692–700.
- Manjaleni, R. (2022). *Persepsi Publik Terhadap Aksesibilitas dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh*. XIX(1), 1–7.
- Manjaleni, R. (2025). *Pengaruh Administrasi Pajak Digital , Kualitas Pelayanan Fiskus , dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 18(2), 578–587.
- Nisa, M. K., Putra, R. S., & Suryanti, L. H. (2025). *Pengaruh persepsi korupsi pajak, transparansi pajak, dan norma ekspektasi terhadap kepatuhan wajib pajak*. 12(1), 2597–2609.
- Nurjanah, M., & Manjaleni, R. (2025). *Proceeding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi) dengan Pendidikan Sebagai Variabel Moderasi Understanding and Tax Sanctions on the Compliance PBB Taxpayers with Education as*. 01(08), 78–86.
- OECD. (2021). *Tax Transparency in Africa 2021 Africa Initiative Progress Report*.
- Pauji, S. N. (2020). *Hubungan tingkat pendidikan, kesadaran, kepercayaan, pengetahuan, masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak*. 01, 48–58.
- Paul, B., Kirubakaran, R., Isaac, R., Dozier, M., Grant, L., & Weller, D. (2023). *A systematic review of the theory of planned behaviour interventions for chronic diseases in low health-literacy settings*. 13(Cdc). <https://doi.org/10.7189/jogh.13.04079>
- Rizalti, & Iskandar. (2025). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah , dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pendahuluan*. 8(1), 165–177. <https://doi.org/10.32662/gaj.v8i1.3546>
- Tuatfaru, M. (2020). *PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP HARGA JUAL KOPRA DI*. 2(2).
- Wardani, D. K., Prabowo, A. A., & Aini, A. N. (2022). *Pengaruh Transparansi Pajak Oleh Fiskus Dan Trust Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Belitung Timur)*. 1(2), 141–148. <https://doi.org/10.54259/akua.v1i2.207>
- Zainudin, F. M. Z., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. (2022). *DENGAN PERSEPSI KEADILAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING*.